

**KETIDAKBERHASILAN PENANGANAN KRISIS FINANSIAL UNI EROPA
TAHUN 2008 HINGGA 2016: DI KASUS YUNANI, ITALIA, PORTUGAL
DAN SPANYOL**

Oktaviana Verbaya Sagala

Departemen Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

Email: sagalaverbaya2@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan dari ketidakberhasilan Uni Eropa dalam menangani krisis finansial di negara-negara anggotanya dengan mengambil studi kasus 4 negara dengan tingkat permasalahan ekonomi paling buruk di Uni Eropa yakni, Yunani, Italia Portugal dan Spanyol. Negara-negara anggota Uni Eropa mengalami krisis finansial dengan latar belakang yang berbeda-beda dan diperparah oleh kehadiran *global financial crisis*. Uni Eropa sebagai institusi memiliki kerangka khusus dalam memberi respon terhadap krisis finansial dan sebagai bentuk tanggungjawab dalam penanganan krisis. Formasi eksekusi penanganan krisis disebut Troika yakni kerjasama antara IMF, European Commission (EC) dan European Central Bank (ECB), di bawah Troika terdapat dua instrumen pendukung yakni Instrumen yang dimiliki Uni Eropa dalam menangani hutang dan krisis likuiditas yakni European Financial Stability Facility (EFSF) dan European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM). Kondisi di negara-negara ini bahwa melihat bahwa hutang terhadap GDP di keempat negara masih terus meningkat hingga tahun 2016. Dengan mendasarkan pada teori *coordination avalanches*, negasi terhadap *optimal control theory* dan *synchronization* dalam *coordination theory* penulis menemukan 2 alasan terkait ketidakberhasilan penanganan krisis Uni Eropa. Pertama terdapat *Mal-strategy* karena penanganan diiberikan sebagai satu kesatuan program tanpa mengacu pada apa yang menjadi realitas ekonomi spesifik dalam domestik, yang memiliki distingsi yang tinggi masing-masingnya. Kedua yakni adanya inkonsistensi anggota-anggota Uni Eropa dengan Maastricht Treaty dibuktikan dengan pelanggaran pasal 104.

Kata-kata kunci: Ketidakberhasilan, Yunani, Italia, Portugal Spanyol, Penanganan Krisis Finansial Uni Eropa

Latar Belakang Masalah

Di tahun 2007 sebagian besar negara-negara di dunia dihadapkan pada krisis finansial global, krisis ini bermula di Amerika Serikat yang kemudian menyebar ke sistem finansial ke negara-negara lain. Kontinen Eropa adalah salah satunya yang menjadi kontinen dominan yang terkena dampak krisis dan tentu saja kemudian berpengaruh negatif ke perekonomian Eropa. Katalis utama dari krisis finansial ini yakni adalah berakhirnya *bubble housing* di Amerika Serikat dari tahun 1998 hingga 2007 yang kemudian meningkatkan 2 digit di harga rumah setiap dua tahun, ini berakhir di bulan Agustus 2007 dan di bulan berikutnya yakni September harga kemudian menurun drastis. Krisis ekonomi memiliki dua dimensi finansial dan real dan masing-masingnya memiliki *channel of transmission* masing-masing dari satu negara ke negara-negara lainnya. Di kawasan euro GDP yang melemah puncaknya di kuartar kedua di tahun 2008 produksi industri melemah sejak titik balik tersebut. Produksi jatuh 15% di AS antara 2007 hingga 2009 dan 20% di euro area di antara 2008 dan 2009. Krisis ini tak bisa dihindari oleh negara-negara Eropa karena AS merupakan destinasi ekspor yang besar dan krisis ini menurunkan ekspor di euro yakni sebesar 21% di antara tahun 2008 hingga 2009. Italia sendiri secara industri dan total ekspor jatuh lebih cepat dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya atau negara-negara euro area yakni 25% di antara 2008 hingga 2009. Posisi perdagangan Italia di area euro memang relatif sensitif terhadap melemahnya siklus bisnis (Rovelli, 2009: 224).

Krisis finansial, dalam perbankan, dikarakteristikan oleh biaya fiskal yang besar dari sektor bank dalam operasi membantu pihak-pihak yang berada dalam kesulitan yang diikuti dengan menurunnya pemasukan yang disebabkan rendahnya aktivitas finansial. Ini berdampak kepada kondisi finansial atau pembiayaan pemerintah dengan sektor hutang publik dan defisit yang mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya (Pace, 2016: 1). Krisis juga diidentikkan dengan defisit kas negara. Defisit rata-rata dalam proporsi GDP bagi Uni Eropa dan *euro area* di tahun 2010 mencapai angka 6.4% dan 6.1%. Data koresponden bagi hutang publik ke rasio GDP sebesar 78.2% dan 83.7%.6, angka ini sangat jauh dari batas yang ditetapkan di Stability and Growth Pact atau SGP. Lemahnya kebijakan yang terkoordinasi dengan baik di euro area berdampak pada munculnya ketidakstabilan dan menunjukkan bahwa nilai mata uang Uni Eropa tidak ditata dengan baik untuk memperhalus gangguan ekonomi regional. Khususnya ketidakmampuan euro area untuk mendorong SGP dengan serentak dan rapi telah berkontribusi pada krisis Yunani (Pace, t.t.: 1).

Uni Eropa menghadapi situasi yang sangat sulit selama krisis finansial dan *sovereign debt* berlangsung dan ini kemudian menunjukkan berbagai kelemahan dalam kerangka original, menggarisbawahi beberapa ancaman dan menghasilkan kebutuhan untuk memperkuat arsitektur yang ada dalam wilayah finansial, fiskal, ekonomi dan juga politik. Keterkaitan resiko perbankan dan fiskal domestik bersama dengan relasi finansial ekstensif antarnegara menjadikan lonjakan yang sifatnya spesifik pada negara hingga pada yang sifatnya sistemik tanpa adanya mekanisme yang cukup kuat untuk menghadapi permasalahan tersebut. Selain itu Uni Eropa juga mendemonstrasikan bahwa terdapat keinginan politik yang cukup untuk bertahan bencana sedemikian rupa. Rata-rata defisit anggaran dalam proporsi GDP bagi EU dan area euro mencapai 6.4 % di tahun 2010 dan 6.1%⁵ masing-masing. Data yang sesuai bagi hutang publik ke rasio GDP yakni 78.2% dan 83.7%.6 (Pace, 2016: 96-97).

Krisis yang melanda wilayah dan negara-negara anggota Uni Eropa ini kemudian mendapat tanggapan dari Uni Eropa itu sendiri sebagai institusi yang bertanggung jawab atas krisis

regional. Uni Eropa membentuk mekanisme dalam menanggapi krisis yang melanda kawasan Uni Eropa dan kawasan euro. Mekanisme penanganan krisis ini dibentuk 2 tahun pasca krisis terjadi. Uni Eropa membangun EFSF untuk mencegah krisis yang lebih besar dari itu. EFSF dibangun untuk menjaga stabilitas finansial dan membantu negara-negara anggota apabila dibutuhkan. Mekanisme ini menyediakan lebih dari 750 milyar euro bagi negara anggota yang mengalami kesulitan luar biasa di luar kendali negara tersebut. Secara konsisten Uni Eropa telah berkomitmen dalam melakukan percepatan dalam perubahan bentuk atau struktural, mendisiplinkan kebijakan fiskal, membangun kerangka resolusi yang lebih efektif dan permanen. Menurut OECD tantangan jangka pendek yang dihadapi oleh para pembuat keputusan di Uni Eropa dihalau oleh kebutuhan untuk menekan dengan implementasi reformasi struktural demi mencegah krisis finansial di masa depan, membangun kemampuan untuk menangkal perekonomian yang volatil dan memperbaiki prospek pertumbuhan jangka panjang dan ketahanan jangka panjang dari pembiayaan publik dalam konteks penuaan populasi. European Economic Recovery Plan yang menerima permintaan mengkombinasikan jangka pendek dan percepatan reformasi struktural sebagai awal dari strategi Lisbon dengan rekomendasi yang spesifik tiap negara. Perencanaan ini merupakan respon terhadap krisis, bertujuan untuk menstimulasi permintaan pasar dan mendorong kepercayaan diri konsumen, mengurangi biaya untuk penurunan ekonomi serta meminimalisir dampaknya (Sandoval, 2011: 9).

Untuk memenuhi penjelasan ketidakberhasilan Uni Eropa berdasarkan dua kriteria di atas, penulis mendasarkan definisi operasional dari efektivitas yang mana kemudian dijelaskan bahwa Uni Eropa tidak memenuhi kriteria tersebut. Pertama, kontribusi studi mengenai rezim dan organisasi internasional yang di awal masa perkembangan studinya. Kay dan Jacobson (1983) mendefinisikan efektivitas sebagai pelaksanaan kepanitiaan, adopsi dari deklarasi, pelaksanaan riset serta kepuasan dari para anggota. Definisi ini menurut penulis mencakup konsep-konsep dan tindakan yang cenderung administratif atau pencapaian dari segi pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Kedua penulis mendefinisikan efektivitas dalam penelitian ini berdasarkan tulisan (2006), yakni bahwa efektivitas merefleksikan pada tujuan utama yang dibentuk dan diadakan oleh pihak yang membentuk kebijakan tersebut serta yang mengoperasikannya sendiri. Selain menempatkan pencapaian tujuan substantif dan prosedur pada nomor urut pertama dalam daftar kriteria efektivitas, Stokke juga menyebutkan definisi konvensional dari efektivitas dalam organisasi internasional atau rezim yakni berkontribusi secara signifikan dalam penyelesaian masalah di tengah adanya berbagai tantangan. Penulis akan menggunakan kedua definisi untuk mendasari pernyataan terkait kondisi tidak efektif dalam penanganan krisis finansial Uni Eropa.

Pendekatan Dependensi dan Kecenderungan Perusahaan Multinasional untuk Menyewa Kelompok Bersenjata

Negasi Optimal Control Theory, ini akan membahas keselarasan teori terhadap implementasi dan bagaimana perilaku anggota organisasi. Dikatakan bahwa semakin tidak jelas atau ambigu kebijakan didefinisikan maka akan semakin besar ruang untuk otonomi yang akan muncul di antara para anggota yang seharusnya menjalankan fungsi implementasi. Dalam Hubungan Internasional memang kebijakan diketahui pada umumnya bersifat umum dan tidak spesifik karena orientasi yang tidak begitu kuat. Dikatakan oleh Martin dan Nakayama (2015). bahwa di dalam situasi yang krisis terdapat permintaan yang tinggi terhadap konsistensi. Ketidakkonsistenan dapat mendorong kerugian terhadap organisasi internasional yakni di antaranya kehilangan pengaruhnya. Gejala tidak konsistennya organisasi internasional adalah suatu bentuk ketidakberhasilan. Ditegaskan bahwa apabila terdapat hukum yang dilanggar maka inklusi dari relasi internal antara organisasi internasional dan negara anggotanya dapat dikatakan tidak konsisten dengan asal dan fungsi dari prinsip *lex specialis derogate lex generalis*.

Pemikiran yang juga mendasari penulis dalam menganalisis penanganan krisis oleh Uni Eropa yakni *Coordination Theory* oleh Thomas Malone. Dalam teori koordinasi sebenarnya tidak hanya semata membahas organisasi namun juga ilmu ekonomi, ilmu manajemen, psikologi, dan computer atau teknologi. Koordinasi menurut Malone (1990). adalah “*working together harmoniously*” atau kemampuan bekerjasama dalam harmoni. Di dalam tulisannya koordinasi dikatakan sebagai situasi terjadi apabila terdapat banyak aktor yang terlibat. Organisasi di dalam kerjasama atau koordinasinya kemudian menentukan tujuan, menentukan aktor-aktor atau pihak-pihak tertentu pada fungsinya, dan melakukan aktivitas sesuai dengan tujuan tersebut. Terdapat elemen-elemen dari koordinasi yang terlihat apabila berbagai aktor dalam aktivitas interdependen ini sedang melakukan upaya dan menunjukkan performa dalam pencapaian tujuan.

Mal-strategy dalam Bentuk Ketidaktepatan Penanganan Troika terhadap Krisis Finansial

EU dalam penanganan krisis menyediakan bantuan bagi bank-bank sebagai bentuk dari tanggung jawab EU. Pertukaran informasi di saat situasi krisis dilakukan berdasarkan MoU dan prinsip dari kerjasama di antara supervisor bank dan bank sentral EU dalam penanganan krisis (Pisani-Ferry, 2010: 347). Dalam proses penanganan suatu bentuk penanganan yang demikian kemudian penulis melihat bahwa perwakilan negara di EU tidak dapat sepenuhnya mendapatkan tempat atau berhasil dalam merepresentasikan kepentingan sesuai dengan masalah spesifik dari negaranya. Oleh Marjan (2008: 296) dijabarkan bahwa penerapan program nasional negara anggota harus menerapkan dan internalisasi kultur dan tatanan yang telah ditentukan di EU. Eksistensi dari strategi-strategi pengembangan keputusan dan implementasi peraturan yang berkualitas diharapkan membangun sinergi. Dalam bertujuan menciptakan kohesi maka ditarik ke sejarah integrasi Eropa. Kohesi merupakan konsep yang dimaksudkan untuk diisi dengan arti yang didukung oleh instrumen finansial yang signifikan. Kohesi sosial dan ekonomi merupakan kata kunci yang dipilih di akhir tahun 80-an di antara konvergensi atau redistribusi. Penulis berpendapat bahwa kemudian ide kohesi ini diteruskan pada segala kebijakan termasuk penanganan krisis dan segala peraturan yang ada, hingga pada tingkatan dimana spesifikasi dan kekhususan tiap negara anggota telah menjadi hal yang tidak penting. Padahal distingsi kasus di setiap negara menentukan kebutuhan dan cara dalam penyelesaian masalah. Konsolidasi fiskal tidak mencapai tujuannya yakni mengurangi rasio hutang terhadap GDP di keempat negara krisis di kawasan euro. Economic Bulletin mengatakan pengurangan pengeluaran, peningkatan pajak merupakan kebijakan dari persepsi yang salah dan pada akhirnya tidak berhasil dan memposisikan negara kembali pada resesi. Penurunan tajam dalam hutang rumah tangga memainkan peran utama terutama di Spanyol. Sektor privat mengalami peningkatan kelemahan dalam konsumsi, reduksi dari pengeluaran telah berdampak pada melemahnya pertumbuhan dan pendapatan dari pajak. Kebijakan *austerity* juga memberikan dampak buruk terhadap produktivitas *Austerity* sendiri adalah kebijakan memotong pengeluaran pemerintah, sebagian besar pada fasilitas sosial bagi masyarakat seperti subsidi dan sejenisnya. Serta mengurangi belanja negara secara umum. Selain itu kerap diikuti peningkatan pajak. Sementara Bailout merupakan tindakan menyelamatkan institusi finansial, yang berada dalam kehancuran atau ketidakberhasilan, yang dilakukan oleh aktor eksternal (Engler, 2017: 89).

Terdapat diagnosis yang salah dengan solusi dari permasalahan yang diambil atau dipandang sebagai permasalahan likuiditas temporer atau lebih tepatnya respon terhadap krisis berakhir dengan generalisir solusi permasalahan yang mana dalam institusi finansial yang seharusnya dapat menghindari permasalahan yang lebih dengan strategi yang berbeda (de Juan *et al.* 2013).

Terdapat dilemma di anggota-anggota EU, sebagaimana diketahui bahwa kebijakan fiskal merupakan bagian dari kedaulatan nasional namun stabilitas harga di area euro membutuhkan setiap pemerintah untuk disiplin secara fiskal. Solusi bagi kontradiksi ini

yakni dengan melakukan desentralisasi dari kewajiban bagi disiplin fiskal dari level Eropa ke level nasional. Setiap anggota area euro diwajibkan membangun institusi-institusi pembuatan kebijakan fiskal yang menjamin secara efektif disiplin fiskal. Namun kesalahan terletak pada keterikatan EU yang tidak memungkinkan negara untuk melakukan langkah yang berbasis nasional. Tidak ada alasan bagi negara untuk mengadopsi model yang sama namun setiap solusi harus sesuai dengan norma baru yang dibangun.

Para pemimpin politik dari EU terutama dalam European Parliament telah berada pada konklusi dimana harus ada langkah drastis menuju integrasi yang lebih politis dan atau fiskal atau kerangka yang lebih jelas dalam menghadapi dampak dari ketidakberhasilan ekonomi dan bagaimana mengikuti peraturan dari EMU. Apabila *bailout* merupakan satu-satunya mekanisme yang diperbolehkan, ketidakpastian dari berapa sumber daya yang akan dibutuhkan secara efektif berarti kontrol terhadap output nasional, sama seperti yang ada di bawah unifikasi fiskal. Melalui pengalaman Uni Eropa mengeliminasi volatilitas dalam nilai tukar dan halangan perdagangan untuk mendorong kompetisi selama ini masih belum berhasil (Belke, 2011: 676).

Dikutip dari berita yang dilansir oleh situs berita investasi dan ekonomi Indonesia bahwa pihak European Commission atau Komisi Eropa berpendapat bahwa sikap fiskal cukup ketat untuk kawasan euro tidak akan tampak tepat mengingat kebutuhan untuk mempertahankan pemulihan dan pandangan ketidakpastian yang lebih luas saat ini. Untuk memberikan dampak fiskal positif, kawasan euro harus mengadopsi pendekatan lebih kolektif yang memperhitungkan perbedaan dalam situasi di negara-negara, kata Komisi Eropa. Uni Eropa sendiri di tahun 2017 memproduksi (Winarto,

Bantuan yang disediakan oleh Uni Eropa tersedia dalam beberapa mekanisme, namun mayoritas merupakan dalam bentuk pinjaman atau hutang. EAMS bekerjasama dengan EU dan menangkal masalah krisis dengan cara cara sebagai berikut 1. Penyediaan hutang Balance of Payment loans kepada negara-negara non-EAMS yang dijamin dalam Council Regulation 332/2002; 2. Penyediaan Bilateral Loans atau pinjaman bilateral; 3. Penyediaan *ad-hoc* bilateral loans; 4. Pendampingan atau bantuan dari EFSM; 5. Peringatan dan arahan EFSF; 6. Rekapitalisasi bank EFSF; 7. Penyediaan EFSF loans atau pinjaman oleh dari EFSF; 8. Pembelian hutang oleh EFSF. (Olivares-Caminal, 2011 Dari delapan poin yang ada mayoritas merupakan pemberian pinjaman

Inkonsistensi di Uni Eropa: Pelanggaran terhadap Maastricht Treaty dalam Implementasi Penanganan Krisis

analisis terkait lemahnya koordinasi dari instrument penanganan krisis Uni Eropa dibuktikan melalui ketidakseragaman kebijakan yang diberikan dengan peraturan yang tertulis. Penulis di bawah ini perjanjian Maastricht pasal 104 yakni *“Overdraft facilities or any other type of credit facility with the ECB or with the central banks of the Member States (hereinafter referred to as “national central banks”) in favour of Community institutions or bodies, central governments, regional, local or other public authorities, other bodies governed by public law, or public undertakings of Member States shall be prohibited, as shall the purchase directly from them by the ECB or national central banks of debt instruments.”* Di dalam pasal ini jelas dikatakan bahwa instrument manapun yang berada di bawah Uni Eropa dilarang untuk memberikan fasilitas bail out atau pembelian obligasi menyeluruh secara langsung, di pasal tersebut juga disebutkan secara langsung bahwa ECB juga tidak memiliki mandat untuk melakukannya, dan instrument manapun tidak diperbolehkan untuk mengambil langkah atau kebijakan tersebut (Maastricht Directives di EU juga selaras dengan pasal tersebut

Alasan dibalik mengapa pasal ini diberlakukan yakni demi sustainability penanganan krisis juga mengatakan bahwa pemberian fasilitas bail out secara langsung ataupun pembelian obligasi atau hutang pemerintah tidak akan membuat negara yang berada dalam krisis dapat mandiri dan lepas dari kebutuhan akan bantuan tersebut. Namun disamping dari kebutuhan

akan kebijakan yang tepat seperti yang telah dibahas oleh penulis di Bab III, di Bab ini akan berfokus pada ketidaksesuaian implementasi dari respon terhadap krisis dengan peraturan yang mendasar. Menurut perspektif legal, Treaties merupakan perjanjian yang memiliki legalitas paling tinggi dalam integrasi Uni Eropa, namun di keempat negara, pasal ini tidak diterapkan, dan kebijakan yang dilakukan masih tetap berrotasi pada *bail out*.

Sebelumnya penulis membahas seberapa kuat tingkat legalitas Maastricht sebagai landasan hukum dalam setiap kegiatan dan langkah di Uni Eropa. Terdapat alasan khusus dibalik mengapa pasal ini kemudian muncul Berdasarkan model asli EMU, negara seharusnya tidak bergantung pada kesempatan untuk mendapatkan bail out, karena ini akan memberikan efek frustrasi di kontrol pasar seperti untuk memastikan negara menjaga disiplin anggaran. Apabila negara mengetahui terdapat kesempatan untuk menerima bantuan finansial, ini akan mengurangi tingkat perasaan bertanggungjawab apabila dibandingkan dengan negara yang mana tidak ada *bailout* yang disediakan bagi ketidakberhasilan finansialnya dan ini merupakan hal yang benar ketika dukungan finansial dibuat berdasarkan persyaratan yang kuat karena konsekuensi dari prospek kenyataan yang lebih kuat daripada biaya *austerity* yang dibutuhkan untuk menerima bantuan finansial (Craig, 213: 9).

Permasalahan legalitas ini agaknya masih belum mendapat perhatian yang cukup dibandingkan dengan isu-isu kritis lainnya seperti meningkatkan konvergensi, pertumbuhan dan lapangan pekerjaan, implementasi unifikasi perbankan, pembentukan konsultan fiskal, mendorong representasi eksternal dari area euro dan maka dari itu perbincangan mengenai bagaimana ESM harus terintegrasi dengan perintah atau mandat legal EU belum juga dan mulai dan tidak akan mulai dalam waktu singkat. Selain itu kebijakan regional EU seringkali mendapat kritik dalam hal-hal teknis dari lemahnya efisiensi, terlalu leburnya pemilihan tujuan dari kebijakan sehingga terjadi *overlapping*, sistem yang tidak fleksibel dan terlalu kompleks, peraturan yang terlalu pakem atau rigid, implementasi yang lambat, transparansi yang lemah merupakan poin-poin yang umum. Beberapa upaya dilakukan dalam mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi serta kerangka sistem dari persiapan anggaran selanjutnya (Marjan, 2008: 296).

Pengabaian pelanggaran ini berbahaya karena di setiap pelanggaran akan terdapat konsekuensi kerugian di bawah merupakan konsekuensi dari pelanggaran. Para peneliti sosial telah mendeskripsikan perubahan institusional dalam regulasi Eropa sebagai proses yang eksperimental dan *incremental* yang mana akan selalu bertambah atau ada hal baru, belum dapat mencapai implementasi dari *grand design*. Setiap langkah mempengaruhi langkah lainnya, serta *stakeholder* baru dibentuk yang mempengaruhi pembenahan institusi selanjutnya dan seperti itu seterusnya. Hal ini berujung pada intervensi Uni Eropa yang terus menebal dan berlapis-lapis. Proses ini juga mengkarakteristikan sebuah pragmatism dari sebuah insitusi. Institusi penanganan krisis yang ada memberikan pengaruh terhadap pasar finansial dan bersifat eksponensial atau terus meningkat dan hal ini memberikan bentuk baru dalam pemerintahan bagi sekuritas pasar Uni Eropa yang sebelumnya merupakan solusi terhadap permasalahan yang disebabkan oleh proses pembentukan regulasi institusional yang kompleks yang tidak tepat guna dalam lingkungan pasar finansial. Ini telah menjadi iklim dalam struktur dan pembuatan regulasi (Moloney, 2011: 531). IMF juga turut serta dalam penanganan masalah yang ada di kawasan mata uang euro, namun kehadirannya memberikan feud lebih dalam masalah akuntabilitas dan transparansi (IEO, 2016: 2). Kerjasama dikembangkan dalam 3 area, pertama kerangka yang bijaksana yang diikuti oleh supervisor nasional yang diharmonisasi di atas legislasi EU. Kedua CEBS atau Committee of European Banking Supervisors yang dibentuk tahun 2003 dengan peran yang terbatas untuk memfasilitasi konsultasi di antara supervisor dan menyediakan saran teknis dalam regulasi. Keiga yakni penyediaan yang dibuat untuk kerjasama di saat krisis (Pisani-Ferry, 2010: 346).

Kesimpulan

Penelitian ini membuktikan bahwa Uni Eropa tidak berhasil dalam mencapai fungsinya, secara spesifik yakni dalam merespon terhadap krisis finansial dengan kerangka penanganan krisis finansialnya. Penulis menganalisis kinerja Uni Eropa dalam penanganan krisis untuk membuktikan kebenaran dua *thesis statement*. Pertama yakni terdapat *mal strategy* yang terjadi di antara Uni Eropa dengan negara-negara yang menangani krisis. Layaknya istilah yang penulis sebut terdapat Kedua yakni bahwa Uni Eropa memiliki inkonsistensi di dalam institusinya di mana dasar legal dari institusinya yang memiliki legalitas yang sangat tinggi dilanggar sendiri oleh negara-negara anggotanya.

Dalam analisis dan pembuktian *thesis statement* yang pertama penulis menemukan bahwa Uni Eropa terbukti memiliki kesamaan respon terhadap permasalahan yang berbeda yang mana penulis sebut sebagai *mal-strategy*. Uni Eropa memang institusi yang mengintergerasi negara-negara anggotanya, namun fakta penting yang Uni Eropa tinggalkan dalam langkah penanganan krisisnya yakni distingsi situasi setiap negara dalam krisis. Krisis finansial global yang meledak tahun 2008 telah mempengaruhi berbagai kawasan termasuk kawasan integerasi Uni Eropa. Namun penulis menemukan bahwa negara-negara yang memiliki tingkat hutang terhadap GDP yang paling tinggi dan terus meningkat tidak serta merta memiliki situasi perekonomian yang sama setelah adanya krisis. Terdapat distingsi yang spesifik yang dimiliki yang mana membuat setiap negaranya membutuhkan penanganan spesifik yang berbeda yang sesuai dengan akar dari permasalahannya. Tindakan atau respon dari Uni Eropa terhadap krisis yang terjadi di Uni Eropa dilakukan dengan melihat Yunani, Italia, Portugal dan Spanyol sebagai satu entitas. Tanggapan yang diberikan pun serupa atau dapat disebut dalam kerangka yang sama saja, walaupun situasi krisis dimulai dari turning point yang berbeda-beda dan situasi kronis yang terjadi di titik tekan yang berbeda-beda pula.

Berikut adalah bantuan-bantuan yang diberikan oleh Uni Eropa dalam merespon krisis yang terjadi di keempat negara yakni Yunani, Italia, Portugal dan Spanyol. Yunani menerima bantuan sebesar 110 milyar euro di tahun 2010. Yunani setuju untuk mengimplementasikan kebijakan *austerity* yakni sebesar 13 persen dari GDP. Demikian pula yang terjadi di Italia Pemerintah juga didorong untuk mempertimbangkan pengurangan biaya untuk pegawai publik dengan memperkuat peraturan-peraturan yang ada dan mengurangi gaji apabila diperlukan, walaupun ukuran dalam arahan ini telah dilakukan di tahun 2008 serta 2010. Setelah diberlakukannya keputusan ini, langkah selanjutnya ditentukan oleh kabinet Monti di tahun 2011 dan 2012, secara formal memasuki proses di tahun 2013. Portugal diberi solusi bail out serta adjustment program dari IMF dan EU sebagaimana yang telah disebutkan bahwa di tahun 2011 Portugal memasuki tatanan 3 tahun dengan IMF serta ECB, program ini berada di bawah EFF (Extended Fund Facility) dan merupakan adjustment program.

Strategi yang diberikan oleh EU tidak berkonsentrasi pada peningkatan pertumbuhan namun malah menekan pada target-target fiskal dan tidak memfokuskan diri pada sustainability namun pemberian pinjaman dan pemenuhan syarat dan ini yang penulis sebut dengan *mal-strategy*.

Perspektif ini juga didukung oleh Kyland dan Scoot dan Robert Cox fenomena ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kegagalan. Menurut Robert Cox terdapat indikator-indikator keberhasilan dari organisasi internasional yakni bagaimana tugas atau mandat sesuai dan konsisten dengan realitas nasional yang ada yang kemudian dilanjutkan oleh Kyland Presscott yang membahas mengenai optimal control theory sebagai pendekatan terhadap permasalahan ekonomi yang mana di dalam membuat kebijakan ekonomi terdapat pakem tertentu atau arsitektur yang harus diikuti dalam mengimplementasikan kebijakan. Dalam hal ini Kyland dan Scoot menyampaikan bahwa ini bukanlah *tool* alat yang tepat dalam perencanaan ekonomi meskipun terdapat fungsi yang telah didefinisikan dengan baik dan telah disetujui serta memiliki fungsi sosial yang pasti. Terdapat kebijakan-kebijakan yang spesifik yang harus dipilih oleh pembuat kebijakan untuk memberikan aksi yang paling tepat, sesuai dengan situasi yang ada. Ekonomi memiliki dinamika sistemik yang mana

kebijakan tak dapat didasarkan oleh teori *optimal control theory*, karena setiap negara dan setiap sistem memiliki *past policy* dan *current policy* dengan tingkat distingsi yang berarti. Penulis menyimpulkan bahwa strategi yang diberikan Uni Eropa sebagai respon terhadap krisis diberikan sebagai satu kesediaan program tanpa mengacu pada apa yang menjadi realitas dalam domestik, yang memiliki distingsi yang tinggi.

Penulis membuktikan bahwa Kebijakan yang dibuat oleh Uni Eropa tidak fleksibel dalam arti mengikuti situasi spesifik dalam memenuhi kebutuhan negaranya, melainkan menyediakan arsitektur khusus untuk memberikan bantuan terhadap negara anggota yang berada dalam situasi krisis dengan kerangka yang sama yakni dengan syarat yang sama, saran kebijakan yang sama yakni *austerity* atau pemotongan pengeluaran negara yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara serta melakukan *bailout* atau penyelamatan bank serta pembelian *bond* atau obligasi negara. Troika akan menyediakan bantuan dalam bentuk *bailout* apabila pengajuan dari negara diterima dan kemudian Troika akan menentukan waktu penerapan *austerity* di dalam proses atau prosedur pemberian bantuan.

Hasil pembuktian thesis statement kedua yakni penulis menemukan bahwa Uni Eropa tidak berhasil dalam menyelaraskan ide, peraturan dan kesepakatan awal dengan aktivitas atau implementasi dalam integrasi. Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Malone mengenai koordinasi dalam coordination theory yakni bahwa di dalam koordinasi terdapat tahapan atau proses ideal yang harus dipenuhi demi memenuhi kebutuhan untuk pencapaian koordinasi yang baik. Proses tersebut di antaranya yakni *identifying goals*, *ordering activities*, *assigning activities to actors*, *allocating resources* dan *synchronizing activities*. Penulis kemudian fokus kepada salah satunya yakni *synchronizing activities*. Dijelaskan kemudian bahwa *synchronizing activities* yang dimaksud adalah kegiatan mensinkronkan implementasi atau aktivitas organisasi internasional dengan tujuan-tujuan awal yang telah ditentukan dan disetujui sebelumnya. Asumsi yang penulis dapat dari artikel tersebut yakni bahwa terlewatkannya salah satu proses merupakan ketidakidealan dan kesalahan dalam organisasi internasional. Sementara Uni Eropa tidak berhasil dalam mensinkronkan tindakan dengan salah satu pasal di Maastricht Treaty yang merupakan salah satu perjanjian penting dengan legalitas yang tinggi yang melandasi kerjasama dan memberi batasan dalam tindakan dan kebijakan anggota Uni Eropa.

Yunani terbukti menjadi implementasi yang salah atau melanggar dari Maastricht Treaty, Terdapat tiga fase penyediaan bailout yang didapatkan Yunani, yang pertama yakni di tahun 2010 dan yang kedua dilakukan di tahun 2012, ketiga 2015. Berada di titik yang sangat dekat dengan dikabulkannya pengajuan *bailout*, Italia menjadi salah satunya. Monte dei Paschi di Siena mengajukan permintaan atas *bailout* dengan alasan bahwa tanpa bailout tersebut mereka akan mengalami pertama kebangkrutan yang mana akan merugikan nasabah-nasabah Italia dengan jumlah besar mengingat bank Monte adalah bank terbesar nomor 3 di Italia, Portugal terpaksa memilih jalan untuk mengikuti jejak Yunani dan Irlandia dalam mengajukan dukungan finansial. Spanyol menjadi negara keempat yang menerima bantuan ekonomi di antara anggota kawasan euro. ECB melakukan intervensi dilakukan dengan membeli obligasi Spanyol untuk menyelamatkan pasar Spanyol. Melalui pandangan negara konsekuensi dari *bailout* merupakan seri dari *austerity*

Referensi:

Abouharb, M. Rodwan dan David L. Cingranelli. 2006. "The Human Rights Effects of World Bank Structural Adjustment, 1981-2000". Wiley on behalf of The International Studies Association

- Ahlborn, Christiane. 2011. "The Rules of International Organizations and the Law of International Responsibility". Amsterdam Center for International Law University of Amsterdam.
- Amenta, Edwin dan Kelly M. Ramsey. 2010. "Institutional Theory". Springer
- Amburgey, Terry L., Kelly Dawn dan Barnett William P. 1993. "Resetting the clock: The dynamics of organizational failure. Admin". Sci. Quart. 38(1) 51-73.
- Anderson, K.M. dan Kaeding, M. 2015. "European Integration and Pension Policy Change: Variable Patterns of Europeanization in Italy, the Netherlands and Belgium". British Journal of Industrial Relations.
- Babb, S.L. dan Carruthers, B.G. 2008. "Conditionality: Forms, Function, and History", *Annual Review of Law and Social Science* 4: 13–29
- Baeriswyl, Romain dan Camille Cornand. 2011. "Transparency and Monetary Policy Effectiveness". GENES on behalf of ADRES.
- Baker, Luke. 2010. Scenarios: EU Financial Crisis Mechanism and Treaty Change. [online], tersedia dalam <http://www.reuters.com/article/us-eu-summit-treaty/idUSTRE69R3UL20101028>. Diakses pada 2 April 2017.
- Battilossi, Stefano. 2009. "Did Governance Fail Universal Banks? Moral Hazard, Risk Taking, and Banking Crises in Interwar Italy". *The Economic History Review*, New Series, Vol. 62, No. S1. Wiley on behalf of the Economic History Society.
- Belke, Ansgar. 2012. "Financial Crisis, Euro Perspectives and The Balkans". *Journal of Economics and Business*. EAST-WEST.
- Cameron, K.S. 1983. "Strategic Responses to Conditions of Decline: Higher Education and the Private Sector, *Journal of Higher Education*, 54, 359-380.
- Cameron, K.A, Sutton, R.I dan Whetten, A.D. .1988.. "Readings in Organizational Decline: Frameworks, Research, and Prescriptions". Ballinger, Cambridge, Massachusetts.
- Christodoulakis, Nicos. 2013. "From Grexit to Growth: on Fiscal Multipliers and How to End Recession in Greece National Institute Economic Review No. 224 may
- Contessi, Silvio. "An Application of Conventional Sovereign Debt Sustainability Analysis to the Current Debt Crises." *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*. Vol. 94, No. 3, May/June 2012, pp. 197–220. <https://research.stlouisfed.org/publications/review/12/05/197-220Contessi.pdf>. Diakses pada 15 April 2018
- Conti, Nicolò. et al, 2016. "The Economic Crisis and its Effects on the Attitudes of Italian Political Elites Towards the EU". GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences.
- Cox, R.W. 1965. "Towards a General Theory of International Organization". *ILR Review*, Vol. 19, No. 1. Sage Publications, Inc.
- Craig P., 'Pringle: Legal Reasoning, Text, Purpose and Teleology', *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2013, p. 9
- de Silva, Amala. t.t. "A Framework for Measuring Responsiveness". World Health Organization.

- Edigin, Lambert Uyi. 2009. Organizational Theories: A Conceptual Analysis. The Nigerian Journal of Politics and Public Policy, 5, (1 & 2), 64-75.
- Eke, Burcu dan Ali M. Kutan. 2009. "Are International Monetary Fund Programs Effective? Evidence from East European Countries". Taylor & Francis, Ltd.
- Élteto, Andrea. 2011. "The Economic Crisis and Its Management in Spain". Eastern Journal of European Studies
- Emmenegger, P., Häusermann, S., Palier, B. and SeeleibKaiser, M. (2012) *The Age of Dualization: The Changing Face of Inequality in Deindustrializing Societies*. Oxford: Oxford University Press.
- European Central Bank. 2010. "ECB's replies to the questionnaire of the European Parliament supporting the own initiative report evaluating the structure, the role and operations of the 'troika' (Commission, ECB and the IMF) actions in euro area programme countries". Online tersedia dalam https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/140110_ecb_response_troika_questionnaire.pdf. Diakses pada 9 Mei 2018
- European Central Bank. 2000. Annual Report 1999, Frankfurt.
- European Central Bank . 2004. "The Monetary Policy of the ECB". Frankfurt: European Central Bank.
- European Central Bank. 2009. "Price Stability: Why Is It Important for You"
- European Central Bank. 2011. Monthly Bulletin July 2011.
- European Central Bank. 2014. "Is the European Central Bank Failing Its Price Stability Mandate?". Peterson Institute for International Economics,
- Fitoussi, J.P, and Stiglitz J. (2009), The Ways out of The Crisis and The Building of a More Cohesive World, The Shadow GN, Chair's Summary, LUISS Guido Carli, Rome, May 6-7. Fitoussi, J.P. and Saraceno, F. (2010), Inequality and Macroeconomic Performance, OFCE /POLHIA N° 2010-13, Paris, 13. Gallino L., (2003), *La scomparsa dell'Italia industriale*, Einaiudi: Torino.
- Gaspar, Vítor. 2012, "Portugal: Gaining Credibility and Competitiveness." Lecture presented March 19, at the Peterson Institute for International Economics. http://www.iie.com/events/event_detail.cfm?EventID=216. Diakses pada 27 April 2018
- Gurnani, Shaan. 2016. "The Financial Crisis in Portugal: Austerity in Perspective". Leigh University
- Hannan Michael T., John Freeman. 1984. "Structural Inertia and Organizational Change". Amer. Sociological Rev. 49 149-164
- Henry, John F. 2010. "The Historic Roots of the Neoliberal Program". Journal of Economic Issues.
- Hermann, Cristoph. 2007. "Neoliberalism in European Union". Studies in Political Economy 79.

- Hofmann, Tobias. 2010. "Non-compliance in the European Union as a Monetary Policy Substitute". University of Utah.
- Jessoula, M. .2013. 'The 'Vincolo Esterno' Thesis Revisited: Irresistible Forces, Movable 'Objects' in Italian Pension Reforms', in 20th International Conference of Europeanists, Amsterdam, 25–27
- Kahn-Nisser, S. 2013. "Conditionality, Communication and Compliance: The Effect of Monitoring on Collective Labour Rights in Candidate Countries", *Journal of Common Market Studies* 51(6): 1040–56.
- Kincaid, G Russell. 2016. "The IMF's Role in the Euro Area Crisis: What are the Lessons from the IMF's Participation in the Troika?". IEO Background Paper Independent Evaluation Office of the International Monetary Fund
- Kuperman, Ranan D dan Binnur Ozkececi-Taner. 2006. "Making Research on Foreign Policy Decision Making More Dynamic". Wiley on behalf of The International Studies Association
- Madura, Jeff. 2006. International Corporate Finance. Keuangan Perusahaan Internasional. Edisi 8. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Malone, Thomas W. dan Kevin Crowston. "What is Coordination Theory and How Can It Help Design Cooperative Work Systems". Center for Coordination Science (E53-333). Massachusetts Institute of Technology Cambridge, MA
- Marjan, Attila. 2008. "Some of the Present and Future Challenges of EU Regional Policy". Society and Economy. Akadémiai Kiadó.
- Martin, J., dan Nakayama, T. 1999. "Thinking dialectically about culture and communication". *Communication Theory*, 9(1), 1-25.
- Martin-Aceña, Pablo. 2013. "The savings banks crisis in Spain: When and how?". World Saving and Retail Banking Institute.
- Miner, S.A, Kim, Ji-Yub, dan Haunschild, P. 1999." Fruits of Failure: Organizational Failure and Population-Level Learning". *Advances in Strategic Management*, 16, 187-220
- Moloney, Niamh. 2011. "Reform of Revolution? The Financial Crisis, EU Financial Markets Law and the European Securities and Markets Authority". Cambridge University Press on behalf of the British Institute of International and Comparative Law
- Monter, Rosario. t.t. "Some Lessons Learned from the Spanish Financial Crisis". University of the Balearic Island
- Morsy, Hanan dan Silvia Sgherri. 2010. "After the Crisis: Assessing the Damage in Italy". International Monetary Fund
- Nelson, Rebecca M et al 2010. "Greece's Debt Crisis: Overview, Policy Responses, and Implications" Congressional Research Service.
- Neumann, M.J.M. .2010. "Imbalances and Sustainability: Who Should Adjust? New Rules and More Cooperation?" Speech at The ECB and its Watchers conference. Frankfurt/Main: July
- Olivares-Caminal, Rodrigo. 2011. "The EU Architecture to Avert a Sovereign Debt Crisis". *OECD Journal*.

- Orsi, Roberto. 2013. The Quiet Collapse of the Italian Economy. [online], tersedia dalam <http://blogs.lse.ac.uk/eurocrisispress/2013/04/23/the-quiet-collapse-of-the-italian-economy/> diakses pada 2 April 2017.
- Ortega, Eloísa dan Juan Peñalosa. 2013. "The Spanish Economic Crisis: Key Factors and Growth Challenges in The Euro Area" Banco de ESPAÑA
- Osifo, Charles. "Organization and Coordination: *An Intra-and Inter Performance Perspective*". University of Vaasa.
- Otero-Iglesias, Miguel et al. 2016. "The Spanish financial crisis: Lessons for the European Banking Union". Real Instituto elcano Royal Institute
- Pace, Christian. 2016. "The Evolution of the European Financial System after the Crisis". *Quarterly Review*. Hlm 96-115
- Papasavvas, Charalambos. 2015. "Responsibility of the ECB in managing the European Debt Crisis: Towards a European Banking Union?". *Law, Social Justice & Global Development Journal (LGD)*
- Pisani-Ferry, Jean, dan André Sapir 2010, "The Best Course for Greece is to Call in the Fund," *Financial Times*, February 1.
- Rittberger, Volker. 1973. "International Organization and Violence". *Journal of Peace Research*, Vol. 10, No. 3, Sage Publications, Ltd.
- Rovelli, Riccardo. 2009. "Economic Policy in a Global Crisis: Did Italy Get It Right?". Berghahn Books.
- Sacchi, S. 2015. 'Conditionality by Other Means: EU Involvement in Italy's Structural Reforms in the Sovereign Debt Crisis', *Comparative European Politics* 13(1): 77–92
- Sacchi, Stefano dan Jungho Roh. 2016. "Conditionality, austerity and welfare: Financial crisis and its impact on welfare in Italy and Korea". *Journal of European Social Policy*.
- Saphiro, Jacob. 2016. "Italy's Bankig Crisis Progresses". *Geopolitical Futures*
- Schmidt, Vivien A. 2010. "The European Union Eurozone Crisis and What not to Do About It". *Brown Journal of World Affairs*.
- Schimmelfenning, F. and Sedelmeier, U. (2004) 'Governance by Conditionality: EU Rule Transfer to the Candidate Countries of Central and Eastern Europe', *Journal of European Public Policy* 11(4): 661–79.
- Sgherri, Silvia dan Hanan Morsy. 2010. "After the Crisis: Assessing the Damage in Italy". IMF Working Paper.
- Sisler, Chiara. 2016. "The Impact of Intergovernmentalism in Crisis Management on the EU Treaties Framework: the Watering Down of the No-bailout Clause". University of Trento Italia. School of International Studies.
- Stockhammer, Engelbert. 2014. "The Euro Crisis and Contradictions of Neoliberalism in Europe". Taylor & Francis, Ltd

- Suarez, Javier. 2010. "The Spanish Crisis: Background and Policy Challenges"
- Quagila, Lucia. 2013. "The Italian Banking System: Monte dei Paschi's Scandal and the Euro Area's Sovereign Debt Crisis". Berghahn Books.
- Quirico, Roberto. 2010. "Italy and the Global Economic Crisis". Bulletin of Italian Politics University of Cagliari
- Véron, Nicolas. 2016, "The IMF's Role in the Euro Area Crisis: Financial Sector Aspects," IEO Background Paper No. BP/16-02/10 (Washington: International Monetary Fund).
- Visvizi, Anna. 2012. "The Crisis in Greece and The EU-IMF Rescue Package: Determinants Pitfalls". Akadémiai Kiadó